

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Parlemen Asing tanya status Novanto

Tanggal : Selasa, 28 November 2017

Surat Kabar : Media Indonesia

Halaman

Parlemen Asing Tanya Status Novanto

Kasus Setya Novanto mendapat perhatian parlemen asing karena Indonesia menjadi pimpinan dalam Global Parliamentary Against Corruption.

DERO IQBAL MAHENDRA

TATUS tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto mengundang pertanyaan dari parlemen negara lain. Ketua Badan Kerja Sama antarparlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf mengaku menerima banyak surat dari parlemen negara sahabat.

"Kami mendapatkan banyak sekali surat dari parlemen luar negeri yang menanyakan bagaimana kejelasan kasus Novanto," kata Nurhayati di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jakarta

kemarin.

Parlemen negara lain men

dengar kabar Novanto di-

dengar kabar Novanto ditangkap karena kasus dugaan korupsi. Surat yang dikirimkan pun, kata Nurhayati, rata-rata menanyakan status hukum Novanto. Mereka penasaran, apakah Novanto telah diproses atau belum.

Apalagi, imbuhnya, Indonesia menjadi pemimpin dalam Global Parliamentary Against Corruption. Nurhayati pun hati-hati menjawab pertanyaan itu karena menyangkut citra DPR RI dan Indonesia di

nyaan itu karena menyangkut citra DPR RI dan Indonesia di mata dunia.
Dia mengaku masih menunggu keputusan yang diambil terhadap Setya Novanto, baik oleh DPR maupun Partai Golkar. Hingga saat ini, Nurhayati mengaku belum memberikan jawaban kepada parlemen luar negeri terkait pertanyaanpartanyaan tersebut. "Saya kira kami menunggu kalau



"Kamis TA mendapatkan banyak sekali surat dari parlemen luar negeri yang menanyakan kejelasan kasus Novanto."

Nurhayati Ali Assegaf Ketua BKSAP DPR

MKD akan bersidang, kita akar

tunggu," ujarnya. Nurhayati menjelaskan, se

Nurnayati menjelaskati, se lama ini Mahkamah Kehor-matan Dewan (MKD) telah melakukan tugas dengan baik. Mereka telah menyidangkan anggota DPR dengan berbagai pelanggaran, mulai kekerasan dalam rumah tangga hingga yang berkaitan dengan tugas kedewanan

kedewanan. Oleh karena itu, politikus Oleh karena itu, poiitikus Partai Demokratitu yakin MKD akan dapat memproses masa-lah yang menimpa Novanto "Keputusannya ada di MKD tapi saya kira akan berjalar sesuai harapan," paparnya.

Survei jadi acuan
Hasil survei Poltracking terkait elektabilitas partai politiljelang Pemilu 2019, Golkan melorot ke posisi ke-3 setelal PDIP dan Gerindra. Waki Sekjen Golkar Maman Abdur

Sekjen Golkar Maman Abdur rahman menyatakan surve tersebut akan menjadi acuar partainya dalam mengambi langkah ke depan.
"Hasil survei itu merupakar suara publik. Jadi saya piki pasti akan menjadi salah sati pertimbangan dalam meng ambil langkah ke depan," jela Maman

Maman.
Meski begitu, dia menekankan dalam mengambil langkah
tersebut Golkar tetap mengikuti
aturan main dan konstitusi
partai. Saat ditanyakan terkait
munaslub, ia menyatakan lima
poin hasil putusan rapat pleno
DPP yang lalu sudah memuat
semua sikap Partai Golkar.
Dengan mengacu pada keputusan pleno tersebut, imbuhnya, tidak perlu lagi adanya
desakan-desakan sebab Golkar
pasti akan mengambil langkah

asti akan mengambil langkah

pasti akan mengambil langkan ke depannya.
Namun, Maman menekan-kan bahwa DPP Golkar tidak ingin mengambil keputusan yang tergesa gesa.
"Platform kami bagaimana partai ini bisa menjalankan semua proses aktivitas organisemua proses aktivitas organi-sasi sebaik-baiknya tanpa ada gangguan dari kasus KTP-E. Kami lebih menjadikan hasil survei kali ini sebagai sebuah dasar dan motivasi. Lebih dari dasar dan motivasi. Lebih dari itu, sebagai untuk segera mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut di Golkar," ujarnya.

Maman juga mengutarakan bahwa isu munaslub berdasarkan situasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan.

Namun, dia menekankan Golkar memiliki mekanisme organisasi yang harus ditaati semua pihak.

"Semua aspirasi akan ditampung dan dijalankan sesusi konstitusi partai," tegasnya. (Mtvn/P-3)